



**DISAIN KELEMBAGAAN GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (GHIPPA)
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN SITUBONDO**

**Taufiq Amin, Lilis Yuliat, Siti Komariyah
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember**

Abstract

Water User Farmer Associations (P3A) or Water User Farmer Association (HIPPA) is a locally institutional organizer Irrigation which is a place of water user farmer in an irrigation service formed democratically by water user farmers and legal. Through Presidential Instruction No. 3 year 1999, the Government made a policy related to the renewal irrigation management by handing over the duties, responsibilities and irrigation authority management to P3A as a making use of P3A in operational implementation and maintenance (OP) and the irrigation sustainability. At this level, P3A independence both economically and socially becomes the fundamental base for realizing P3A role in participative implementation management of irrigation system. The single HIPPA Joint will form GHIPPA which has a working area at secondary channel, while single HIPPA has the working area at tertiary channel. The coordination among local institutions of water irrigation management is the foundation which must be built to be able to create independent irrigation water management. The aims of this research are to analyze institutional economy pattern between GP3A/GHIPPA and P3A/HIPPA in Situbondo in doing water resource management interaction, and to formulate institutional design of independent GP3A/GHIPPA and P3A/HIPPA to create efficient water resources management to guarantee agricultural business sustainability in Situbondo. The results show that interaction between GHIPPA and HIPPA is a coordination in water management, but it is still not optimal, and less intense. It can be seen from the absence of an integrated work program between GHIPPA and HIPPA in conjunction with water resources management. Field observation suggests that water management institution located in Situbondo is still less in a role of water regulation and more dominated by sub-block role as the operator of the field.

Keywords: institutional design, GHIPPA/GP3A, Management, Water Resources

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian dengan makanan pokoknya beras, sagu, dan ubi hasil produksi pertanian. Pada titik ini, ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan beras dan makanan pokok lainnya menjadi sangat penting. Jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan menjadi 275 juta jiwa pada tahun 2025, maka untuk memenuhi produksi bahan makanan pokok berupa padi, sangat diperlukan

jaringan irigasi (Salim, 2005). Keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan air sebagai salah satu faktor input yang mendukung proses produksi pertanian. Irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras. Dalam hal ini, dibutuhkan pengelolaan air yang mandiri dan partisipatif oleh kelembagaan lokal.

Upaya penerapan pengelolaan sumberdaya air yang partisipatif diwujudkan dengan pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). P3A atau HIPPA merupakan kelembagaan lokal pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis dan berbadan hukum. Melalui Inpres no 3 Tahun 1999, Pemerintah membuat kebijakan terkait pembaharuan pengelolaan irigasi dengan menyerahkan tugas, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A sebagai upaya pemberdayaan P3A dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (OP) dan keberlanjutan irigasi. Pada aras ini, kemandirian P3A baik secara ekonomi maupun sosial menjadi landasan fundamental demi mewujudkan peran P3A dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang partisipatif.

Gabungan HIPPA tunggal akan membentuk GHIPPA yang memiliki wilayah kerja pada saluran sekunder. Sedangkan HIPPA tunggal memiliki wilayah kerja pada saluran tersier. Koordinasi antara lembaga lokal pengelola air irigasi tersebut merupakan pondasi yang harus dibangun untuk dapat mewujudkan pengelolaan air irigasi yang mandiri. Menurut Commons (1931) dalam Yustika (2012), kelembagaan merupakan hak-hak dasar yang bersifat alamiah (*natural rights*) yang menjadi kerangka hukum dalam mengatur tindakan individu, yang saling berinteraksi dalam sebuah 'perilaku ekonomi' (*economic behavior*), membandingkan hal-hal yang dinamis dengan statis, proses dengan komoditas, kegiatan dengan perasaan, tindakan kolektif dengan tindakan individu, manajemen dengan keseimbangan dan pengawasan dengan kebebasan (*laissez faire*). Senada dengan pernyataan tersebut, Bardhan (1989) dan Manig (1991), kelembagaan didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan, norma-norma sosial, serta unsur-unsur lain pada sebuah struktur kerangka kerja interaksi sosial, yang menggambarkan sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi kelembagaan lahir dari sebuah proses yang terjadi secara terus menerus dan bukan merupakan sebuah landasan yang telah direncanakan melainkan merupakan sebuah proses yang terjadi sebagai respon adanya perubahan tujuan ekonomi (Brousseau dan Glachant; 2007).

North (1990) memilah kelembagaan berdasarkan atas bentuknya (tertulis/tidak tertulis) yaitu: informal dan formal. Kelembagaan informal dimaknai sebagai kelembagaan yang norma dan ajarannya menjadi tradisi dan sudah melekat di masyarakat dan pada umumnya norma dan ajarannya tidak tertulis. Adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan merupakan kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah segala bentuk aturan dan norma yang tertulis seperti

perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kelembagaan formal meliputi semua kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional maupun lokal. Acapkali kelembagaan informal bertransformasi menjadi kelembagaan formal. Perubahan tersebut merupakan reaksi atas perubahan kehidupan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Perubahan tersebut dimaknai sebagai tuntutan atas terjadinya perubahan zaman dan dinamika kehidupan. Masyarakat tradisional dengan kehidupannya yang serba sederhana dengan potensi konflik yang sangat minim tentu tidak membutuhkan peraturan tertulis yang rinci yang berbeda dengan masyarakat modern dengan segala kompleksitas kehidupannya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola kelembagaan ekonomi antara GHIPPA di Kabupaten Situbondo dalam melakukan interaksi pengelolaan sumberdaya air dan merumuskan disain kelembagaan GHIPPA yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan potret yang menyeluruh (*holistic*) atas sebuah permasalahan yang ada untuk dicarikan solusinya.

2.1 Metode Penentuan Informan

Metode penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan dipilih secara sengaja yang dianggap mengetahui atau memberikan gambaran yang lengkap terhadap focus penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang terdiri atas 5 informan kunci yaitu ketua ataupun pengurus GHIPPA serta informan dari instansi terkait dan 3 informan tambahan yaitu ketua ataupun pengurus HIPPA tunggal.

2.2 Metode Pengambilan Data

Fokus penelitian ini adalah pada upaya penggalian data-data yang terkait kelembagaan GHIPPA dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air. Data sekunder diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian dan informasi lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diambil langsung oleh peneliti dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari dokumen ataupun laporan yang dimiliki oleh instansi terkait dengan focus dan tema penelitian. Pengambilan data primer menggunakan dua metode yaitu metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan metode *Focus Group Discussion (FGD)*. Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*) dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk memberikan arahan/panduan pertanyaan agar data yang diperoleh tetap berada

dalam kerangka focus penelitian. Metode pengambilan data melalui FGD bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari peserta FGD terkait tema yang akan dibahas yaitu menganalisis kendala, peluang, kekuatan dan kelemahan GHIPPA dalam melaksanakan pengelolaan saluran irigasi pada saluran sekunder.

2.3 Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif keadaan di lapangan dirangkai dari peristiwa-peristiwa yang unik dan merupakan hal yang sangat penting. Kondisi ini tidak dapat dibatasi pada nilai salah atau benar, juga tidak ada batasan angka-angka dan variabel-variabel. Terdapat dua metode analisis data pada penelitian ini, yaitu :

- a. Pertanyaan empiris pertama akan dijawab menggunakan data yang dianalisis menggunakan metode analisis *interactive model analysis* yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman. Dalam model ini menggunakan tiga komponen analisis yaitu : Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).
- b. Pertanyaan empiris kedua akan dijawab menggunakan Metode Analisis SWOT, metode analisis digunakan untuk merumuskan disain kelembagaan yang mandiri untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Situbondo.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pola Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Situbondo

Kelembagaan dalam pengelolaan air terdiri dari aturan formal yaitu berupa adanya landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang pembentukan perkumpulan petani pemakai air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), aturan informal yaitu nilai-nilai tradisional yang sudah berjalan di masyarakat seperti *ulu-ulu* air atau *lo benyo* dan mekanisme penegakan yaitu dengan adanya sanksi moril bagi petani yang melakukan penyalahgunaan air atau pengingkaran dalam membayar iuran air. Pada Gambar 1. berikut akan disajikan skema pembentukan kelembagaan pengelola air, yaitu:

b) Pembentukan HIPPA/GHIPPA karena Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor pendorong munculnya lembaga pengelola air irigasi. Kebijakan yang menjadi landasan pertama kali adalah Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1982. Pada titik ini, adanya kebijakan pemerintah telah berimplikasi pada perubahan kelembagaan pengelola air yaitu dengan terbentuknya lembaga HIPPA sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan air pada saluran tersier.

HIPPA menjadi bagian dari GHIPPA dan masing-masing lembaga memiliki wilayah dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan HIPPA dirasakan lebih dekat terhadap petani daripada GHIPPA. Namun disisi lain, GHIPPA merupakan lembaga yang sering berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pengelola air yang regulasinya lebih tinggi seperti induk HIPPA ataupun komisi irigasi.

2. Pemilihan Ketua dan Pengurus GHIPPA

Pemilihan ketua dan pengurus GHIPPA diatur dalam AD/ART GHIPPA, dimana ketua merupakan orang yang dipilih melalui proses musyawarah yang dihadiri oleh pengurus HIPPA yang menjadi anggota GHIPPA serta perwakilan petani dan pemerintah desa. Ketua GHIPPA dipilih dari ketua atau pengurus HIPPA, dimana pemilihannya dilakukan dalam waktu 5 tahun sekali. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pemilihan ketua ataupun pengurus GHIPPA sering tidak sesuai AD/ART. Dalam AD/ART, pemilihan ketua atau pengurus dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali namun kenyataannya pemilihan ketua dan pengurus dapat dilakukan sewaktu-waktu (kurang dalam 5 tahun) sesuai kebutuhan di lapangan.

3. Kas GHIPPA

Salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi dan peran GHIPPA dalam pengelolaan air adalah tidak adanya kas dalam lembaga GHIPPA. Semua informan menyatakan bahwa GHIPPA tidak memiliki kas sehingga pelaksanaan program kerja GHIPPA tidak dapat dilaksanakan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan AD/ART GHIPPA. Di dalam AD/ART, kas GHIPPA berasal dari setoran HIPPA yang diperoleh dari perhitungan persentase dana IPAIR. Setiap GHIPPA memiliki aturan yang berbeda terkait jumlah dan besaran yang harus di setorkan HIPPA ke kas GHIPPA. Perhitungan besaran kas GHIPPA biasanya dihitung dari jumlah luasan sawah dan jumlah panen.

Namun, kenyataan di lapangan aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh HIPPA karena HIPPA juga tidak memiliki kuasa untuk melakukan pengelolaan dana IPAIR. Hal ini mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan AD/ART dan tidak adanya penegakan yang dijalankan. Lemahnya penegakan terhadap aturan organisasi HIPPA menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan peran dan fungsi HIPPA sebagai lembaga pengelola air irigasi.

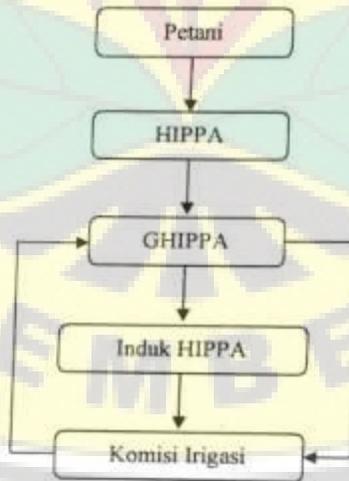
4. Kewenangan GHIPPA

Salah satu unsur yang membentuk tata kelola air irigasi oleh GHIPPA adalah batas kewenangan dan wilayah yang dimiliki oleh GHIPPA. GHIPPA memiliki

Disain Kelembagaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air.....

kewenangan untuk melakukan pemantauan air irigasi beserta pemeliharaan saluran sekunder. Namun, GHIPPA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan pintu air. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kewenangan GHIPPA yang saat ini dapat dilaksanakan oleh GHIPPA adalah: (i) ikut menyusun Rencana Tata Tanam Global (RTTG), (ii) Memantau kondisi air dan melakukan pemeliharaan saluran sekunder, (iii) Melakukan koordinasi dengan lembaga di atasnya, apabila ada masalah pengelolaan air, (iv) Menjadi partner pemerintah dalam melakukan pemeliharaan saluran sekunder melalui swakelola dana pemerintah, dan (v) Pola Koordinasi Antara Lembaga Pengelola Air

Lembaga pengelola air merupakan sebuah organisasi yang bersifat sosial dan ekonomi, yang merupakan perwujudan kelompok petani pemakai air. Dalam hal ini, adanya interaksi antar anggota kelompok merupakan hal yang akan mewarnai dinamika kelompok secara keseluruhan. Sebagai sebuah kelompok, lembaga pengelola air memiliki tujuan kelompok yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan lembaga pengelola air adalah adanya system pembagian air yang adil dan merata bagi petani dan sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah sebuah langkah seperti penyusunan struktur kelompok serta struktur tugas kelompok. Rentang kendali yang cukup panjang, berimplikasi pada sulitnya melakukan koordinasi sehingga diperlukan pembentukan kelompok sesuai dengan wilayah kerjanya. Dalam hal ini terdapat beberapa lembaga yang dibentuk yaitu HIPPA, GHIPPA, Induk HIPPA dan Komisi Irigasi. Pada Gambar 2. berikut akan disajikan pola koordinasi diantara lembaga pengelola air, yaitu:



Gambar 2. Pola Koordinasi Lembaga Pengelola Air

Rujukan data pada Gambar 2, memberikan gambaran bahwa sistem koordinasi pengelolaan air merupakan sistem koordinasi berjenjang, dimana petani sebagai Individu kemudian berkelompok membentuk HIPPA. Beberapa HIPPA yang memiliki wilayah kedekatan hidrolis berkelompok membentuk GHIPPA. Dari beberapa GHIPPA membentuk lembaga pengelola air lainnya yaitu Induk HIPPA. Sedangkan pada wilayah Kabupaten, beberapa instansi yang terkait dalam pengelolaan air seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Pertanian serta BAPPEDA membentuk Komissis Irigasi Kabupaten. Hubungan diantara keempat kelembagaan tersebut bersifat koordinasi utamanya dalam menghadapi permasalahan dalam pengelolaan air irigasi.

3.3 Disain Kelembagaan GHIPPA yang Mandiri

Pemberdayaan GHIPPA dalam pengelolaan air irigasi pada saluran sekunder merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipatif petani dalam pemeliharaan saluran. Dalam hal ini, kelembagaan GHIPPA yang mandiri menjadi kunci dalam pelaksanaan program kerja GHIPPA. Strategi disain kelembagaan GHIPPA yang mandiri di Kabupaten Situbondo akan dirumuskan dari hasil analisis SWOT.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan maka, faktor-faktor yang mempengaruhi kelembagaan GHIPPA yang mandiri akan disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Matriks Faktor Internal dan Eksternal GHIPPA

	PELUANG (O):	ANCAMAN (T):
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penganggaran baik dari Pemerintah Daerah ataupun Pusat untuk membantu pemeliharaan Saluran Sekunder 2. Dibentuknya Komisi Irigasi Kabupaten untuk mengatasi permasalahan pengelolaan air irigasi 3. Pembinaan dari DBMP yang lebih intens terhadap GHIPPA daripada HIPPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumbermata air yang mulai berkurang jumlah airnya 2. Kondisi musim kemarau di Kabupaten Situbondo yang relatif lebih panjang dari kota lainnya 3. Kepercayaan petani yang kuat terhadap subblok dan sering meladakan peran GHIPPA
KEKUATAN (S):	Strategi menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang (S-O): <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakses bantuan kepada Pemerintah untuk pendanaan pemeliharaan Saluran Sekunder 2. Mengaktifkan HIPPA sebagai lembaga pengelola air ditingkat bawah 3. Melakukan koordinasi rutin dengan Komisi Irigasi 4. Berkoordinasi dengan DBMP untuk melakukan pembinaan terhadap GHIPP dengan rutin 	Strategi menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman (S-T): <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya penghijauan di daerah hulu untuk menjaga sumber air 2. Melakukan penyusunan RTTG dengan menghitung ketersediaan air dengan tepat 3. Berkoordinasi dengan HIPPA untuk lebih meningkatkan peran GHIPPA dan HIPPA
KELEMAHAN (W):	Strategi menggunakan kelemahan untuk menangkap peluang (W-O): <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Komisi Pengairan untuk menyusun program kerja dalam pengelolaan irigasi, 	Strategi menggunakan kelemahan untuk mengurangi ancaman (W-T): <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja untuk mengatasi masalah kekurangan air 2. Memasukkan pemeliharaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi wadah penerima bantuan dana pemeliharaan saluran sekunder 2. Landasan hukum untuk melakukan pengelolaan air secara partisipatif, 3. Anggota GHIPPA sekaligus sebagai anggota HIPPA 4. Merupakan lembaga yang berbadan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki program kerja yang jelas 2. AD/ART hanya disusun satu kali di awal pembentukan 3. AD/ART tidak dilaksanakan 	

Disain Kelembagaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air.....

<p>4. Tidak memiliki dana kas untuk membiayai kegiatan GHIPPA</p>	<p>2. Menyusun AD/ART sesuai kebutuhan lembaga 3. Melaksanakan AD/ART yang telah dibuat 4. Berkoordinasi dengan Komisi Irigasi untuk menghimbau HIPPA melakukan penyetoran kas ke GHIPPA 5. Berkoordinasi dengan Komisi Pengsiran untuk membuka usaha ekonomi lain sebagai sumber pendapatan (kas) 6. Berkoordinasi dengan DBMP untuk melakukan pembinaan kepada HIPPA</p>	<p>sumber air sebagai salah satu program kerja GHIPPA 3. Menyusun dan melaksanakan AD/ART untuk menjalankan roda organisasi 4. Membuka usaha lain sebagai sumber pendapatan GHIPPA</p>
---	--	--

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap kelembagaan GHIPPA, diperoleh posisi GHIPPA berada pada kuadran III. Hal ini berarti bahwa posisi GHIPPA berada dalam kondisi yang lemah tetapi menghadapi peluang yang besar. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk menangkap peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh GHIPPA. Berikut Gambar 2. Untuk menunjukkan kuadran lembaga GHIPPA berdasarkan analisis SWOT, yaitu:

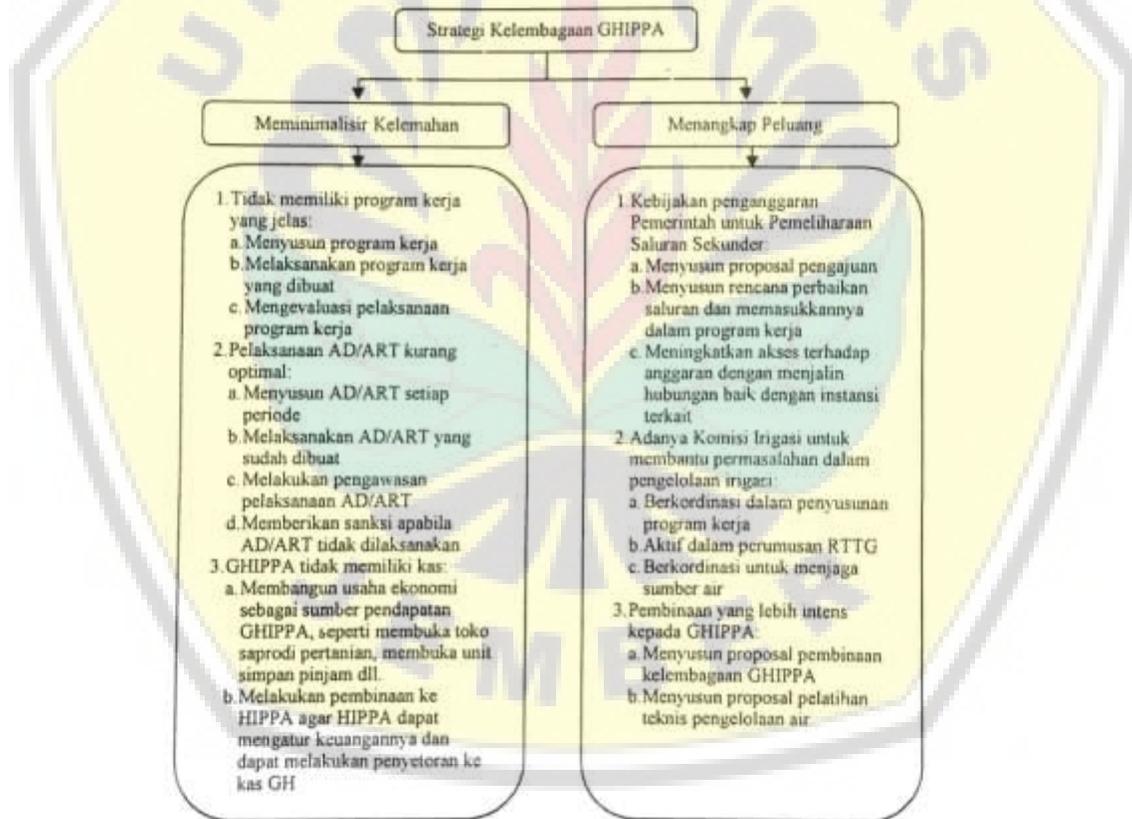


Gambar 2. Kuadran Analisis SWOT

Sesuai hasil analisis SWOT, rekomendasi strategi yang terpilih adalah strategi (W-O) yaitu strategi yang digunakan untuk menangkap peluang dengan meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh GHIPPA. Strategi tersebut antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Komisi Irigasi untuk menyusun program kerja dalam pengelolaan irigasi, yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan intensitas pertemuan ataupun komunikasi dengan Komisi Irigasi guna mendapatkan saran dan masukan bagi penyusunan program kerja GHIPPA agar program kerja tersebut selaras dengan tujuan pengelolaan irigasi yang menjadi agenda Komisi Irigasi.
2. Menyusun AD/ART sesuai kebutuhan lembaga.

3. Melaksanakan AD/ART yang telah dibuat, sebagai landasan bagi sebuah organisasi dalam menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Penegakan aturan-aturan yang telah disepakati dan disusun dalam AD/ART merupakan sebuah keharusan agar AD/ART menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata kelola organisasi.
 4. Berkoordinasi dengan Komisi Irigasi untuk menghimbau HIPPA melakukan penyetoran kas ke GHIPPA, untuk mengaktifkan kinerja HIPPA yang selama ini dianggap mati suri agar HIPPA memiliki aktivitas dan memiliki kas. Sehingga, HIPPA mampu melakukan penyetoran kas terhadap GHIPPA sesuai yang dituangkan dalam AD/ARTnya.
 5. Berkoordinasi dengan Komisi Pengairan untuk membuka usaha ekonomi lain sebagai sumber pendapatan (kas).
 6. Berkoordinasi dengan DBMP untuk melakukan pembinaan kepada HIPPA.
- Disain kelembagaan tersebut dapat di gambarkan pada Gambar berikut ini.



Gambar 3. Disain Kelembagaan GHIPPA yang Mandiri

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap fokus dan tema penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pola kelembagaan GP3A/GHIPPA di Kabupaten Situbondo disusun oleh tiga komponen yaitu aturan formal, aturan informal dan sanksi sosial menjadi faktor yang mendasari pembentukan kelembagaan dalam pengelolaan air.
- b. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap posisi organisasi, maka GHIPPA berada pada kuadran III dimana posisi GHIPPA berada dalam kondisi yang lemah tetapi menghadapi peluang yang besar.

4.2 Saran

Berdasarkan rujukan data serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maka, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat di rumuskan oleh peneliti adalah:

- a. Bagi Pemerintah: Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembentukan pola kelembagaan GHIPPA yang mandiri. Kebijakan yang dapat dirumuskan antara lain:
 - (i) Regulasi penganggaran yang memihak kepada pendanaan operasional dan pemeliharaan (OP) GHIPPA untuk pengelolaan saluran sekunder,
 - (ii) Penganggaran pemabinaan agar lebih intens melakukan pembinaan dan pelatihan kepada GHIPPA terkait peningkatan GHIPPA dalam mencari solusi teknis ataupun solusi kelembagaan,
 - (i) Menyusun kebijakan yang dapat menjadi landasan bagi GHIPPA untuk ikut membahas pendistribusian air dari saluran sekunder ke saluran primer, dan
 - (ii) Meningkatkan pertemuan dan koordinasi Komisi Irigasi dengan lembaga pengelola air dibawahnya.
- b. Bagi GHIPPA:
 - (i) Agar GHIPPA dapat melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan AD/ART dan program kerja yang menjadi pedoman bagi jalannya GHIPPA. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan AD/ART merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan petani terhadap lembaga pengelola air yang kompeten.
 - (ii) Kemandirian GHIPPA dapat diperoleh apabila GHIPPA memiliki kegiatan ekonomi sebagai sumber pendapatan yang dapat membiayai semua aktivitasnya, seperti membuka toko saprodi pertanian, menyewakan alat-alat pertanian, dan membuka usaha simpan pinjam.
- c. Bagi Peneliti/akademisi lainnya: Diperlukan sebuah penelitian tentang kelembagaan GHIPPA yang mandiri dengan menggali unsur modal sosial yaitu kepercayaan petani terhadap lembaga pengelola air.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardhan, Pranab. 1989. *Alternative Approaches to The Theory of Institutions in Economics Development*. Dalam Pranab Bardhan. (ed). *The Economic Theory of Agrarian Institutions*. Clarendon Press. Oxford
- Brousseau, Eric, et al. 2011. *Institutional Changes: Alternative Theories and Consequences for Institutional Design*. *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol. 79: 3-19
- Manig, Winfried. 1991. *Structural and Institutional Changes in Rural Northwest Pakistan*. *The Journal Of Development Studies*. Vol. XII: 1-20
- North, Douglass C. 1990. *Institutions and Transaction-cost Theory of Exchange*. Dalam James E. Alt and Kenneth A. Shepsle. *Perspectives on Positive Political Economy*. Cambridge University Press. Cambridge.
- 1994. *Economic Performance Through Time*. *The American Economic Review*. Vol. 84, Issue 3, June : 359-368
- Yustika, Ahmad Erani . 2012. *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Erlangga